

LIBRARY, THE DEFENDER OF INDONESIAN LIERACY CULURE

PERPUSTAKAAN, GARDA BUDAYA LITERASI INDONESIA

Oleh :
Dian Arya Susanti
Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia
e-mail: dian.arya.s@gmail.com

Abstrak. Bangsa Indonesia pernah memiliki budaya literasi, walaupun budaya lisan tetap menjadi yang lebih kuat, sampai sekarang. Akibatnya adalah bangsa yang malas membaca, yang mengakuisisi pengetahuan dan mentrasfernya kembali tanpa melakukan klarifikasi, terutama pada media-media sosial. Padahal bangsa yang cerdas adalah bangsa yang memiliki budaya literasi yang tinggi, dimana membaca dan menulis sudah menjadi kebutuhan dalam kehidupan keseharian masyarakatnya. Dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan tujuan pemerintahan Indonesia, salah satunya yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Menjadi bangsa yang cerdas artinya menjadi bangsa yang budaya literasinya tinggi, yang memiliki kebiasaan membaca serta mampu menghasilkan banyak tulisan yang berkualitas, dan untuk bisa mewujudkan itu, perpustakaan dengan pustakawan-pustakawan yang inovatif harus bisa menjadi inkubator rencana kegiatan dan kebijakan yang terkait dengan peningkatan budaya literasi di Indonesia. Metode yang digunakan pada artikel ini adalah studi literatur, studi literatur digunakan untuk meninjau teori yang ada dan penelitian yang sudah pernah dilakukan terkait peran pustakawan dalam menjaga pengetahuan.

Kata Kunci: Indonesia, Budaya Literasi, Inovasi, Perpustakaan, Pustakawan

Abstract. The Indonesian used to have a culture of literacy, although oral culture continues to be more adequate, until now. The result from it was a nation that have no will on reading, which acquired knowledge and transferring it back without clarification, especially happens on social media. Intelligent nation is a nation that has a high literacy culture, where reading and writing has become a necessity in society daily life. In 1945 Consitutional Acts Opening, Indonesian government declared its objectives, one of which is to build the intellectual life of the nation. Being an intelligent nation means to be a nation that holds a high literacy culture, which has a habit of reading and be able to produce a lot of quality writing. And to be able to exteriorize it, the library with its innovative librarians should be an incubator of planned activities and policies related to escalate the culture of literacy in Indonesia. This is a review article which tries to observe the existed theory and research that has been done about the role of librarian in guarding the knowledge.

Keywords: Indonesia, Literacy Culture, Innovations, Library, Librarian

PENDAHULUAN

Staf perpustakaan adalah orang-orang yang secara fungsional mempunyai tanggung jawab, baik secara langsung atau tidak langsung bagi pelayanan perpustakaan. Bagaimanapun lengkapnya koleksi dan fasilitas perpustakaan, bila tidak ditangani oleh personel yang memadai maka kekayaan yang tersedia di perpustakaan akan kurang mempunyai makna dan arti. Tentunya maksud personel yang ahli disini yaitu pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.

Tugas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan bukan hanya menunggu koleksi, tetapi juga melayani komunitas sekolah dan membuat bagaimana caranya agar perpustakaan dapat berdaya guna bagi pengembangan pengetahuan siswa khususnya, dan dapat memperkaya proses belajar mengajar di sekolah pada umumnya. Untuk itu, pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan harus memiliki motivasi yang kuat, wawasan yang luas, dan senantiasa berupaya secara aktif agar dapat melaksanakan pelayanan sebaik-baiknya. Dengan demikian, penyelenggaraan perpustakaan dapat berjalan seoptimal mungkin dengan hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pustakawan bukanlah orang yang soliter, dia ada untuk keperluan pemustaka. Semua kerja yang dilakukannya semata-mata untuk

memenuhi kebutuhan pemustaka akan informasi, rekreasi, pengetahuan dan bahkan kebijaksanaan. Perpustakaan tidak akan ada tanpa koleksi bahan bacaan untuk dilayankan, dan tidak akan hidup tanpa ada orang-orang yang datang untuk membaca bahan bacaan tersebut.

Kemajuan zaman menuntut setiap individu lebih menginginkan informasi yang beragam. Berbagai informasi yang diinginkan seyogyanya dapat pula diperoleh dari perpustakaan. Namun, hasil survey menyebutkan bahwa tingkat literasi di Indonesia tidaklah tinggi. Oleh karenanya, perpustakaan sebagai suatu organisasi yang berkembang dapat menjadi gerbang bagi masyarakat untuk menumbuhkan budaya literasi agar kebutuhan informasi yang dibutuhkan setiap individu dapat dengan mudah terpenuhi.

Dalam rangka menciptakan budaya literasi, pemahaman akan literasi harus lebih dahulu dikuasai oleh pustakawan selaku perantara antara perpustakaan dan pencari informasi. Literasi berdasarkan kesepakatan yang diambil pada *World Summit on the Information Society* (WSIS) seperti yang dikutip oleh Sukaesih (2014) bahwa setiap orang dapat mencipta, mengakses, menggunakan dan berbagi/membagikan informasi dan pengetahuan. Pada paparan tersebut jelas terlihat bahwa setiap orang dapat menjadi pribadi yang literat.

Beberapa hasil penelitian yang

menggambarkan budaya literasi diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hidayah (2017) yang menghasilkan kesimpulan bahwa kegiatan literasi yang dimulai dengan kegiatan wajib baca 15 menit telah dilakukan di Sekolah Dasar, namun dalam pelaksanaannya perlu ada dukungan dari berbagai pihak dengan didukung oleh berbagai fasilitas yang memadai yang dapat ditunjang dengan dana alokasi sekolah sebanyak 5 persen bagi perpustakaan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ainiyah (2017) yang menyimpulkan bahwa dengan berkembangnya zaman dan semakin beragamnya media informasi, gagasan literasi media ke dalam pendidikan menjadi terlihat tepat untuk diterapkan dalam pendidikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengadopsi konsep *digital citizenship* yaitu pemberian *skill* literasi media guna mendukung pembangunan global. Selain dua penelitian tersebut, Suryaman (2015) secara gamblang dalam penelitiannya yang berkenaan dengan pelaksanaan literasi usia dini menemukan bahwa kemampuan membaca siswa Indonesia masih belum memadai jika dibandingkan dengan siswa di dunia internasional. Berdasarkan fenomena dalam temuan-temuan tersebut, budaya literasi sangat perlu ditumbuhkan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Indonesia sebagai sebuah negara, telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, akan tetapi Indonesia sebagai sebuah bangsa belum sepenuhnya merdeka. Bangsa ini masih terjebak dalam pusaran kegalauan pengakuan diri sebagai seorang individu merdeka yang bercampur dengan adanya rasa inferior terhadap bangsa-bangsa Eropa yang pernah datang dan menjajah negeri ini, baik secara sadar maupun tidak. Mahbubani dalam Alwasilah mengatakan bahwa “*The most painful thing that happened to Asia was not the physical but the mental colonization. Many Asians... began to believe that Asians were inferior being to the Europeans. Only this could explain how a few thousands British could control a few hundred million people in South Asia*”.

Rasa inferior yang tertanam jauh di dalam hati mereka yang pernah dijajah membuat kemerdekaan atau dalam arti lebih sempitnya “kebebasan” seringkali disalahkaprahkan. Belum lagi dalam keadaan merdeka sekalipun, masyarakat Indonesia belum bisa sepenuhnya merdeka dari tekanan-tekanan ekonomi, sosial dan politik. Ketidakmerdekaan ini membiaskan rasa kebebasan yang bertanggungjawab menjadi kebebasan yang *euphoric*. Kebebasan yang lebih sering dilihat sebagai kebebasan yang sebebaskan-bebasnya tanpa menghiraukan adanya hak orang lain dalam kebebasan individu. Kemerdekaan seharusnya

membawa warga masyarakat menjadi lebih baik pada setiap aspek kehidupannya, seperti misalnya pada aspek kesejahteraan, kemakmuran, kesehatan dan pendidikan. Para *founding father* negeri ini sudah mencoba untuk merumuskan visi dan misi kemerdekaan, yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang 1945 “...untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”, yang sayangnya masih belum bisa mewujudkan sampai saat ini.

Hasil *Progress in International Reading Literacy Study* (PIRLS) pada siswa usia 15 tahun yang dikeluarkan oleh OECD tahun 2006 menggambarkan betapa kondisi budaya literasi bangsa ini sangat memprihatinkan, yaitu;

1. Skor prestasi membaca di Indonesia adalah 407 (untuk semua siswa), menempati urutan ke-5 dari bawah.
2. Ditemukan tiga kategori negara berdasarkan perbandingan skor membaca *literary purposes* (LP) dan *informational purposes* (IP). Negara yang prestasi membaca LP lebih tinggi dari IP adalah Hongaria, Kuwait Lithuania, Georgia, dan Israel. Negara yang prestasi membaca IP-nya lebih tinggi dari LP adalah Indonesia (tertinggi), Maroko, Afrika Utara,

Moldavia dan Singapura. Negara yang relatif LP-nya sama dengan IP adalah Luksemburg, Latvia, Skotlandia, Austria, dan Inggris. Indonesia termasuk negara yang memiliki indikator lebih tinggi dalam *retirieving and straightforward inferencing process* daripada dalam *interpreting, integrating, and evaluating process*.

3. Di Indonesia hanya tercatat 2% siswa yang berprestasi membacanya masuk ke dalam kategori sangat tinggi, 19% masuk ke dalam kategori menengah, dan 55% masuk ke dalam kategori rendah.
4. Hanya 44% orang tua di Indonesia (Skotlandia 85%), terlibat dalam *early home literacy activities* atau belajar membaca di rumah, yang kegiatannya yaitu membacakan buku, bercerita, menyanyi, bermain huruf, bermain kata dan membaca nyaring.
5. Literasi juga diukur dengan *index of home educational resources*, yaitu jumlah buku, jumlah buku anak-anak, sumber belajar lainnya, komputer, dan akses ke internet dan surat kabar. Indonesia masuk ke posisi paling bawah, yaitu hanya 1% yang masuk kategori tinggi (memiliki 100 buku, lebih dari 25 buku anak, memiliki lebih dari 3 sumber belajar lain dan salah satu orang tua berpendidikan sarjana). Sisanya masuk kedalam kategori sedang 62% dan rendah 37%.

Padahal siswa yang dijadikan responden ini akan menjadi angkatan kerja pada sepuluh sampai lima belas tahun ke depan, dimana pasar bebas China dan Asia sudah akan dilaksanakan. Bila keadaan seperti ini tidak segera diperbaiki dalam sebuah sistem pendidikan nasional yang menyuburkan iklim membaca dan

menulis, maka tentunya kualitas mereka sebagai angkatan kerja akan kalah bersaing. Persaingan kerja mereka bukan hanya dengan warga lokal, tetapi juga dengan orang-orang dari Malaysia, Vietnam, Thailand, Singapura dan warga negara lainnya yang sangat mungkin memiliki kesiapan dan kemampuan untuk bekerja lebih tinggi.

Hak untuk bisa membaca dan menulis merupakan hak paling dasar bagi seorang individu, karena dengan literasi, individu akan mampu beradaptasi dengan lingkungannya, lebih mengenal hak-haknya, dan memiliki pilihan-pilihan yang lebih luas dalam menjalani hidupnya, dan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk membuat warga negaranya memiliki kemampuan membaca dan menulis, setidaknya pada tingkat dasar. Bila kemampuan baca-tulis masyarakat, maka terbangunlah individu-individu yang *literate*, yang bersama-sama akan menjadi sebuah masyarakat yang *literate*. Membangun perilaku dan budaya *literate* adalah kunci untuk membangun masyarakat pembelajar (*learning society*), yang lalu akan berkembang menjadi masyarakat berpengetahuan (*knowledge society*) yang berbasis pada pengembangan kualitas hidup manusia.

Budaya Literasi di Indonesia

Membangun individu-individu yang *literate* atau seringkali dialihbahasakan

menjadi literasi, bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Diperlukan sebuah gerakan pembiasaan sehingga terbentuk masyarakat yang berbudaya literasi, yang pada akhirnya, seperti sudah dikatakan sebelumnya, akan membangun masyarakat pembelajar, dan terus berkembang menjadi masyarakat berpengetahuan.

Budaya literasi terdiri dari dua kata, yaitu budaya dan literasi. Menurut Selo Soemardjan, budaya memiliki pengertian sebagai sebuah sarana hasil karya, cipta dan rasa yang dimiliki manusia. Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rahmat (2006) dalam “Komunikasi Antar Budaya” menyatakan bahwa budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh, bersifat kompleks, abstrak dan luas. Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss (1996) dalam “*Human Communication*” mendefinisikan budaya sebagai suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi, dengan dipelajari. Jadi, budaya merupakan sebuah cara bagi sekelompok orang dalam hidup bersama, yang dalam mencoba untuk menjadi bersama dalam kelompok tersebut dibuatlah hasil karya, cipta dan rasa yang diterima, dipelajari dan digunakan bersama, serta diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

Kamus Oxford (2015, hlm. 898) menyatakan bahwa definisi literasi adalah kemampuan membaca dan menulis.

UNESCO mendefinisikan seseorang yang berliterasi adalah orang yang dapat membaca dan memahami bacaannya, yang kemudian menuliskan/menerapkan hasil bacaannya dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menjadi manfaat bagi pekerjaan maupun komunitasnya. A. Chaedar Alwasilah (2012) dalam “Pokoknya Rekayasa Literasi” berkesimpulan bahwa literasi adalah kemampuan menggunakan simbol-simbol tulis sebagai keterampilan hidup (*life skill*) agar semua warga negara demokratis dapat berperan dalam masyarakat madani.

Jadi bila disimpulkan, budaya literasi adalah kemampuan menggunakan simbol-simbol tulis sebagai keterampilan hidup dalam bermasyarakat, yang manfaatnya bisa dirasakan bersama, dan dipelajari serta diturunkan kepada generasi selanjutnya. Akan tetapi, budaya literasi belum menghablur dalam perikehidupan bangsa Indonesia saat ini. Alwasilah mencermati bahwa bahkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak ada lema literasi, yang ada adalah literer dan literator. Padahal kedua lema tersebut hanya membahas kemampuan tulis menulis saja, tidak kepada kemampuan membaca. Dan membaca merupakan kunci untuk menghasilkan tulisan yang bagus, walaupun orang yang banyak membaca tidak serta merta menghasilkan banyak tulisan.

O'Sullivan dalam Alwasilah

menyatakan bahwa,

“...literacy is not and never has been a personal attribute or ideologically inert 'skill', simply to be acquired by individual persons, neither is it a mere technology, though it does require a means of production, both physical (a tool to write with and a material to write on) and social (a recognized notation or alphabet and a way of transmitting the knowledge required to manipulate it”.
(Alwasilah, 2012)

Literasi bukan dan tidak akan pernah menjadi atribut personal atau kemampuan ideologis pasif yang bisa dengan mudah didapatkan oleh seseorang, dan bukan juga sesuatu yang teknologis, walaupun memang dibutuhkan menghasilkan sesuatu dalam prosesnya, baik secara fisik (alat untuk menulis dan material untuk menuliskannya) serta sosial (pengenalan notasi-notasi dan huruf-huruf serta cara-cara untuk mentransmisikan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memanipulasinya).

Lebih lanjut, Alwasilah juga menyatakan,

“Pada masa silam, membaca dan menulis dianggap 'cukup' sebagai pendidikan dasar untuk membekali manusia menghadapi tantangan zamannya.... Literasi selama bertahun-tahun dianggap sekedar persoalan psikologis, yang berkaitan dengan kemampuan mental dan keterampilan baca-tulis, padahal literasi adalah praktik kultural yang berkaitan dengan persoalan sosial politik.”(Alwasilah, 2012)

Budaya literasi merupakan budaya yang mendorong tumbuhnya inovasi baru

dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa Socrates, siswa di Yunani diperkenalkan pada budaya literasi, sehingga berkembanglah beragam ilmu pengetahuan dari sana. Begitupun di Mesopotamia dan Alexandria, dimana perpustakaan penuh dengan catatan-catatan pemikiran dan dokumentasi situasi dan kondisi, yang direkam pada berbagai macam media, mulai dari tablet tanah liat, parchment kulit, hingga kertas papyrus, kesemuanya disimpan dan ditata kembali untuk dibaca oleh mereka yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan.

Berbeda dengan budaya yang berkembang di Indonesia, kebanyakan budaya itu menggunakan seni tutur atau budaya lisan, dimana proses transfer budaya lebih banyak dilakukan melalui penuturan dari mulut ke mulut. Budaya lisan ini semakin kuat dengan masuknya teknologi komunikasi dan informasi, mulai dari radio, televisi, dan kini dengan internet. Hal ini menyebabkan terjadinya lompatan fase, dimana fase bercerita tidak dilanjutkan dengan fase membaca, tetapi langsung melompat ke fase menonton.

Suroso dalam Yumna (2012) menyatakan bahwa salahsatu tantangan terbesar pemberdayaan bangsa ini adalah meninggalkan budaya lisan untuk memasuki budaya tulis. Walaupun sebenarnya, budaya baca dan tulis di berbagai suku bangsa di Indonesia telah memiliki budaya literasi yang sangat kuat.

Salah satu contohnya adalah naskah I La Galigo milik Suku Bugis, yang terdiri dari 2851 halaman, yang panjangnya mengalahkan Mahabharata dan Ramayana dari India, atau Homeros dari Yunani.

Para Bapak Bangsa juga merupakan orang-orang penggila baca tulis. Bung Hatta memiliki perpustakaan pribadi, yang sekarang setelah dikumpulkan, berwujud perpustakaan besar di tanah kelahirannya. Bahkan beliau menyatakan bahwa “*Aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena, dengan buku, aku bebas*”. Soekarno, tak lekang dalam setiap kesempatan membaca dan menulislah yang menjadi penghiburannya. Kiai Ahmad Dahlan, ketika pulang dari Makkah, bukunya hampir satu gerbong. Buya Hamka, hampir setiap pergi ke toko buku selalu kehabisan uang karena banyaknya buku yang dibeli. Beliau juga menulis lebih dari 80 buku sepanjang hayatnya.

Buku sebagai sebuah media sekaligus sarana yang merupakan subjek sekaligus objek, merupakan sesuatu yang vital dalam pembudayaan literasi. Andre Mourois pada Purwono (2009) menyatakan bahwa buku adalah satu-satunya alat untuk mempelajari abad-abad yang sudah lewat. Tanpa media tulis dan tanpa buku yang memungkinkan tulisan dalam kuantitas besar disatukan dan disimpan, pengetahuan di dunia tidak mungkin berkembang dengan luas.

Senada dengan Mourois, UNESCO masih pada Purwono (2009) menyatakan bahwa dengan buku, orang bisa mempelajari hasil pemikiran para bijak cendekia yang telah hidup terpisah berabad-abad sebelumnya, tanpa harus bertemu muka, dan belajar darinya.

“books are pre-eminent as vehicles for information and research, and as a source of culture and recreation, serving national development and the enrichment of individual human life, and for storing that better understanding between people of different nations and cultural and that strengthening of desire in the minds of men and women to which is dedicated.” (Purwono, 2009)

Ironisnya, sampai saat ini, semangat menuangkan ide ke dalam tulisan belum berjalan maksimal di lapangan. Fasli Djalan menyatakan bahwa kemampuan ilmuwan Indonesia untuk menyumbangkan penelitian ke jurnal ilmiah hanya 0,8 artikel per satu juta penduduk. Padahal ilmuwan seharusnya adalah orang-orang dengan tingkat literasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat kebanyakan. Dalam kondisi seperti ini, budaya literasi masih harus di-*infuse*-kan ke dalam budaya-budaya lain yang ada di Indonesia, dan pekerjaan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan secara sepihak. Perlu koordinasi antara perpustakaan dan masyarakat, yang didukung oleh berbagai lembaga pemerintahan.

Perpustakaan sebagai Inkubator Budaya Literasi

Perlu disadari, pembudayaan literasi dalam berbagai aspek kehidupan memang menjadi tulang punggung kemajuan peradaban suatu bangsa. Kita tidak mungkin menjadi bangsa yang besar, bila hanya mengandalkan budaya oral yang mewarnai pembelajaran di hampir setiap lembaga pendidikan. Di kelas-kelas, mulai dari tingkat yang paling rendah hingga yang paling tinggi, kebanyakan masih mengandalkan transfer ilmu via oral dari pengajar kepada siswa. Ironi tingkat literasi yang rendah menunjukkan ketidakmampuan bangsa ini dalam mengelola sistem pendidikan yang mencerahkan dan memberdayakan bagi segenap anak bangsa yang potensial dan cerdas. Sudah saatnya budaya literasi harus lebih ditanamkan sejak usia dini agar anak bisa mengenal bahan bacaan dan menguasai dunia tulis menulis (Permatasari, 2015).

Sarana yang paling tepat untuk memulai budaya literasi tersebut adalah perpustakaan. Perpustakaan dalam pengertian tradisional diartikan sebagai suatu unit terorganisir yang terdiri dari tiga unsur, yaitu buku, ruang dan pustakawan. Tanpa ada salah satunya, tentu tidak sah sesuatu itu disebut perpustakaan. Walaupun paradigma perpustakaan mulai bergeser dengan semakin mutakhirnya teknologi informasi, akan tetapi, ketiga unsur itu

tetap merupakan prasyarat utama sebuah perpustakaan. Misalnya saja, ketika koleksi berubah menjadi *paperless* dan semua sumber pengetahuan berubah dalam bentuk digital. Akan tetapi, ketika menjadi digital pun, tidakkah namanya tetap buku/*e-book*? Atau ketika bangunan perpustakaan berubah menjadi digital, apapun sebutannya, tidakkah tetap disebut sebagai sebuah ruang maya? Dan kesemua itu tanpa pengelola yang kompeten dan profesional, akan kemana dibawahnya buku dan ruang tersebut?

Perpustakaan juga merupakan sebuah lembaga pengelola pengetahuan eksplisit dari para pemikir, yang didatangi oleh orang-orang yang mau berfikir dan ingin menjadi pemikir dengan membaca hasil pemikiran orang lain. Rene Descartes menyatakan *cogito ergo sum*, aku berfikir, maka aku ada. Keberadaan yang hakiki adalah ketika seseorang berfikir, maka dia menjadi. Tanpa berfikir, seseorang belum menjadi, belum mewujudkan, dan untuk mewujudkan, dia perlu perpustakaan. Dalam kaitannya dengan budaya literasi, perlu ditekankan bahwa setiap individu perlu menjadi sesuatu, perlu mewujudkan, dalam bentuk pemikiran, dalam bentuk perbuatan, dalam hasil karya, cipta dan rasa, yang akhirnya menjadi budaya yang melekat dalam perikehidupan keseharian masyarakat.

Pengetahuan secara umum setidaknya memiliki tiga hal penting, yaitu;

1. Pengetahuan merupakan

kumpulan informasi mengenai intuisi, pengalaman dan urutan kegiatan.

2. Pengetahuan diorganisir dan dianalisis hingga dapat dimengerti dan diaplikasikan.
3. Pengetahuan digunakan sebagai pedoman untuk berfikir, bertindak laku, berkomunikasi, memecahkan masalah serta mengambil keputusan.

Pengetahuan eksplisit sendiri adalah pengetahuan yang bersumber dari pengetahuan tacit yang diartikulasikan, didokumentasikan, dan diorganisir dalam sebuah media, sehingga bisa dengan mudah diakses oleh orang lain yang membutuhkannya. Contoh media tersebut yang paling sering ditemukan adalah dalam bentuk buku.

Buku sebagai subjek sekaligus objek budaya literasi, ditatakelola di dalam perpustakaan. Istilah tatakelola (*governance*) terkait dengan pengaturan, pengarahan, atau pengendalian. Praktik tatakelola mencakup proses dan sistem, yang dengan ini semua, sebuah masyarakat bekerja atau beroperasi. Proses tatakelola pengetahuan di perpustakaan, yaitu;

1. Identifikasi pengetahuan, mana informasi yang dibutuhkan paling dibutuhkan oleh pemustaka, dan mana yang tidak terlalu dibutuhkan.
2. Akuisisi pengetahuan, dimana pengetahuan eksplisit yang tertulis dalam bentuk cetak maupun digital diakuisisi agar bisa berada di perpustakaan.
3. Transfer pengetahuan, dimana setiap koleksi perpustakaan bisa diakses oleh siapapun tanpa melihat harkat, pangkat dan

- jabatan seseorang.
4. Perubahan pengetahuan, yang melibatkan proses inovasi dalam konteks perpustakaan bisa diimplementasikan dalam bentuk penulisan data bibliografis koleksi, ataupun perubahan dalam bentuk alihbentuk koleksi menjadi sesuatu yang baru, misalnya dari bentuk cetak menjadi digital.
 5. Penyimpanan pengetahuan, yaitu bagaimana pengetahuan disimpan dan ditata agar semua orang bisa mengakses kembali dengan mudah, baik di rak maupun pada basis data.
 6. Penggunaan kembali pengetahuan, baik dalam bentuk cetak maupun digital oleh pemustaka, hanya bisa dimungkinkan melalui akses ke perpustakaan. Pengetahuan yang tidak diartikulasikan dan didokumentasikan, apalagi yang intrinsik, akan sulit digunakan kembali oleh banyak orang.

Istilah tatakelola dalam situasi praktis sering disertai asumsi-asumsi berkenaan dengan bagaimana suatu tatakelola mungkin diwujudkan. Tidak jarang tatakelola dipersepsikan sebagai penyelenggaraan kekuasaan atau kewenangan untuk mengatur, mengarahkan atau mengendalikan. Yuliar (2009) dalam buku “Tatakelola Teknologi” mengasumsikan bahwa keteraturan atau keterarahan memerlukan adanya agen yang cukup memiliki kewenangan politis untuk bisa mengemban peran sebagai pengatur atau pengendali. Walaupun demikian, kajian mengenai konsentrasi kuasa menghasilkan dua kubu, dimana satu kubu menjadikan konsentrasi kuasa

sebagai pembangun tatakelola yang efektif dengan koersi peraturan, tapi pada kubu yang lain, konsentrasi kuasa juga menghancurkan tatakelola ketika nilai yang dianut kelompok marjinal berbeda dengan yang dianut kelompok penguasa. Intinya adalah, tatakelola baru bisa mewujud dengan adanya agen-agen manusia, yang menjadi basis keberadaannya atau *raison d'etre*-nya. Manusia dan masyarakat tidak bisa sekedar menjadi objek dari tatakelola, melainkan harus melalui kemitraan dan konsultasi dalam ranah kebijakan yang lebih luas dan proses keputusan yang bersifat partisipatori. Perpustakaan sebagai penatakelola pengetahuan seharusnya berfungsi sebagai inkubator budaya literasi, dengan memprakarsai berbagai aktivitas literasi serta membuat dan mengintervensi kebijakan-kebijakan yang dibuat dan ada di negeri ini. Dan ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya pustakawan yang inovatif yang mau bergerak sebagai agen perubahan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan *review article* atau merupakan sebuah artikel studi literatur yang bertujuan untuk membuka wacana dan pemikiran terkait peran pustakawan dalam menjaga pengetahuan yang hidup di perpustakaan serta bagaimana caranya mempertahankan orang-orang untuk terus datang ke perpustakaan, terlepas dari pengaruh masifnya inovasi teknologi informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Staf perpustakaan adalah orang-orang yang secara fungsional mempunyai tanggung jawab, baik secara langsung atau tidak langsung bagi pelayanan perpustakaan. Bagaimanapun lengkapnya koleksi dan fasilitas perpustakaan, bila tidak ditangani oleh personel yang memadai maka kekayaan yang tersedia di perpustakaan akan kurang mempunyai makna dan arti. Tentunya maksud personel yang ahli disini yaitu pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.

Menurut UU No.43 Tahun 2007, pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Pemerintah Indonesia sudah mengakui pustakawan sebagai sebuah profesi, dengan adanya atura-aturan yang mendukung, seperti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.33 tahun 1998, yang dijelaskan melalui PP No.30 Tahun 1990. Kepmenpan ini lalu direvisi sesuai kebutuhan dan perkembangan tugas-tugas fungsional pustakawan, menjadi Kepmenpan No.9 tahun 2014. Tugas-tugas fungsional yang terkandung dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut adalah pekerjaan yang berlaku umum dilaksanakan oleh pustakawan, walaupun

peraturannya tidak berlaku bagi seluruh pustakawan yang ada di Indonesia.

Inti dari tugas-tugas pustakawan adalah menyelenggarakan perpustakaan yang melakukan tatakelola pengetahuan, dimana kebutuhan akan pengetahuan tertentu dikumpulkan, lalu di-akuisisi, diolah agar pencariannya menjadi lebih cepat dan mudah, serta dilayankan bagi seluruh umat manusia. Pengetahuan yang dikelola oleh pustakawan, tentunya yang berada di perpustakaan, bersifat eksplisit dalam bentuk tertulis, baik tercetak maupun digital. Lembaga apapun yang menaungi perpustakaan, tugas pustakawan adalah sama, baik di pemerintahan, sekolah, perguruan tinggi, maupun masyarakat luas. Dengan adanya naungan aturan-aturan, seharusnya pustakawan memiliki kuasa untuk menentukan kebijakan yang perlu dan harus diambil di dalam perpustakaan.

Sayangnya, profesi pustakawan, terutama di negeri ini, masih dipandang sebelah mata, bahkan terkadang bisa dikatakan, hanya dilihat dengan mata tertutup alias tidak dilihat sama sekali. Pandangan masyarakat di Indonesia terhadap keberadaan profesi pustakawan masih kurang begitu menghargai, malah mungkin diantara pustakawan sendiri yang kurang menghargai profesinya (Santi, hlm.77). Hal ini tentunya terkait dengan peran perpustakaan yang juga belum menjadi sesuatu yang vital, yang bisa memenuhi

kebutuhan masyarakat pada umumnya. Ketika orang sakit secara fisik, mereka pergi ke klinik untuk bertemu tenaga kesehatan agar bisa kembali sehat fisiknya, maka dari itu masyarakat mengakui kebutuhan akan profesi tenaga kesehatan. Ketika mereka bermasalah dengan hukum, mereka pergi ke lembaga bantuan hukum atau kantor-kantor pengacara untuk membantu mereka terlepas dari jeratan hukum, maka dari itu masyarakat mengakui kebutuhan akan profesi tenaga hukum. Akan tetapi, masyarakat Indonesia saat ini tidak pergi ke perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan mereka akan pengetahuan, karena informasi bisa mereka dapatkan dari *handheld gadget* atau *smartphone* yang mereka miliki, tanpa mengetahui kadar keshahihan informasi yang mereka terima. Berbeda dengan pengetahuan yang tersaji di perpustakaan, dimana keshahihannya bisa dijamin, bahkan oleh para pembuat pengetahuan itu sendiri. Mereka pasrah dengan pengetahuan yang diberikan oleh sistem pendidikan, dengan tidak menghiraukan isi pengetahuannya dan ketepatan klasifikasi usia anak-anak mereka.

Dengan fenomena seperti ini, sudah selayaknya pustakawan berinovasi, membuat rencana kegiatan dan kebijakan yang mampu meng-*infuse* budaya literasi kedalam hati dan jiwa masyarakat, demi memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti

yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Kanter dalam Ancok (2012) berpendapat bahwa inovasi adalah hasil karya pemikiran baru yang diterapkan dalam kehidupan manusia. Sedangkan West dan Farr dalam Ancok (2012) menyatakan bahwa inovasi adalah pengenalan dan penerapan dengan sengaja gagasan, proses, produk, dan prosedur yang baru pada unit yang menerapkannya, yang dirancang untuk memberikan keuntungan bagi individu, kelompok, organisasi dan masyarakat luas.

Sejalan dengan definisi budaya yang telah dinyatakan sebelumnya, adanya hasil karya, cipta dan rasa manusialah yang membentuk budaya, agar bisa diterima dan bertahan dalam berperikehidupan bersama. Hasil karya, cipta dan rasa ini sejalan dengan konsep inovasi, yang merupakan hasil karya pemikiran yang baru, yang dirancang untuk memberikan keuntungan bagi individu, kelompok, organisasi ataupun masyarakat luas. Dengan menekankan pada keuntungan yang didapat oleh masyarakat luas, seharusnya, bila pustakawan bisa melakukan inovasi-inovasi terkait budaya literasi, maka tidak akan ditemukan kesulitan yang berarti.

Ada beberapa pendapat mengatakan, perpustakaan kalah menarik dan kalah fungsional dengan Google, yang mampu dimasukkan ke saku dan memberikan informasi atau hiburan kapanpun

diinginkan. Akan tetapi, pustakawan yang berjejaring dengan media sosial, bisa memberikan informasi yang lebih akurat dan lebih shahih dibandingkan dengan Google. Laksmi (2016) mengatakan bahwa saat ini pustakawan berjuang untuk menyamakan kedudukan dengan tempat-tempat hiburan, dengan mengubah gedungnya menjadi senyaman mungkin, dengan permainan warna-warna cerah pada interiornya, penyediaan sofa dan karpet, sudut-sudut permainan, serta *home theater* yang memadai. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang dilayani tertarik untuk datang, dan berkegiatan di perpustakaan. Pustakawan harus terus mencoba berinovasi untuk menyajikan pengetahuan dengan *added value* agar bisa bersaing dengan kapitalis.

Beberapa pustakawan di taman bacaan masyarakat mencoba untuk menarik minat masyarakat dengan mengajak remaja dan anak-anak muda beraktivitas di tempat mereka sambil mencari informasi yang dibutuhkan sesuai aktivitas mereka. Beberapa mengadakan workshop kejuruan, seperti perbengkelan, memasak, menyulam, merajut, atau bahkan menulis, serta menyediakan buku-buku yang terkait kegiatan tersebut. Beberapa yang lain mengarah anak-anak dengan usia yang lebih muda, dengan mengadakan permainan-permainan, atau kegiatan-kegiatan yang bisa menyalurkan hobi anak-anak, yang diantara waktu senggang antara permainan-permainan itu, pustakawan menyediakan buku-buku

yang bisa mereka baca.

Pustakawan di perguruan tinggi juga tidak kalah inovatif, dengan menyediakan perpustakaan sebagai sebuah ruang publik yang bisa digunakan oleh mahasiswa, tidak hanya untuk kegiatan terkait akademik, tapi juga untuk kegiatan-kegiatan kreatif dan penyaluran bakat mahasiswa. Diharapkan, dengan masuk dan beraktivitasnya mahasiswa di perpustakaan, mereka juga akan menggunakan pengetahuan yang tersedia di perpustakaan.

Pustakawan diharapkan bisa mengenali kebudayaan yang berada di sekitar tempatnya bertugas, sehingga bisa berinovasi dan mengembangkan layanan-layanan dan budaya literasi tanpa adanya friksi yang timbul dari masyarakat sekitar perpustakaan. Adaptasi teknologi informasi di perpustakaan sangat mungkin mengalami friksi, terutama bagi perpustakaan yang berada di pedesaan. Kendala-kendala terkait keterampilan pemanfaatan teknologi informasi, pemeliharaan, serta sumber energi bisa menjadi permasalahan pelik bagi perpustakaan. Akan tetapi, bila pustakawan bisa mengenali kebudayaan yang ada sebelum meng-*infuse*-kan budaya literasi ke tengah masyarakat, serta mau bekerjasama dengan berbagai pihak terkait, tentunya tidak akan ada masalah yang berarti dalam proses pembudayaan literasi masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Perpustakaan sebagai penatakelola pengetahuan memiliki peran yang penting dalam pembudayaan literasi masyarakat Indonesia, apapun lembaga penanggungjawabnya. Dengan pustakawan-pustakawan yang inovatif, diharapkan perpustakaan bisa melaksanakan dan mengembangkan peran tersebut sehingga terciptalah Indonesia yang cerdas. Diharapkan, dari artikel ini, bisa dibuka wacana-wacana diskusi dan hasil-hasil penelitian lebih lanjut terkait peran pustakawan dalam mengembangkan literasi dan budaya baca di setiap lapisan masyarakat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, N. (2017). Membangun Penguatan Budaya Literasi Media dan Informasi Dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 2(1), 65-77.
- Alwasilah, A. C. (2012). *Pokoknya Rekayasa Literasi*. Bandung: Kiblat Buku Utama.
- Ancok, D. (2012). *Psikologi Kepemimpinan & Inovasi*. Jakarta: Erlangga.
- Hidayah, L. (2017). Implementasi Budaya Literasi Di Sekolah Dasar Melalui Optimalisasi Perpustakaan: Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri di Surabaya. *Jurnal Ketahanan Pangan*, 1(2), 48-58.
- Indonesia. (2007). Undang-undang Republik Indonesia No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- Laksmi; F. K. (2016). *Budaya Informasi*. Jakarta: ISIPII Press.
- Mulyana, D., Rakhmat, J. (2006). *Komunikasi antar Budaya: panduan berkomunikasi dengan orang-orang berbeda budaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Permatasari, A. (2015). Membangun Kualitas Bangsa dengan Budaya Literasi.
- Purwono. (2009). *Buku Materi Pokok: dasar-dasar dokumentasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Santi, T. (2014). Membangun citra pustakawan IAIN-SU Medan. *Jurnal Iqra*, 8(1).
- Sukaesih dan Rohman, A.S. (2013). Literasi Informasi Pustakawan: Studi Kasus di Universitas Padjajaran. *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, 1(1), 61-72.
- Sukaesih (dkk). 2015. Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Naskah Kuno di Kabupaten Garut. *Prosiding Semiloka Nasional Kepustakawanan Indonesia*. Bandung, 19-21 Agustus 2015.
- Stevenson, A. (ed.). (2015). *Oxford Dictionary of English, 3rd ed.* Oxford: Oxford University Press.
- Suryaman, M. (2015). Analisis Hasil Belajar Peserta Didik Dalam Literasi Membaca Melalui Studi Internasional (PIRLS) 2011. *JURNAL LITERA*, 14(1), 170-186.
- Tubbs, S. L. & Moss, S. (1996). *Human Communication: konteks-konteks komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Yuliar, S. (2009). *Tata Kelola Teknologi; perspektif jaringan-aktor*. Bandung: Penerbit ITB
- Yumna, M. Z. (2012). *Perpustakaan dan Budaya Literasi*.